TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3891

TANTANGAN DIVERSITAS SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

The Challenges of Diversity in the Islamic Education System in Indonesia

Wakhidah Kurniawati & Sukari
Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
wakhidah.kurniawati1978@gmail.com; sukarisolo@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 1, 2024	Sep 16, 2024	Sep 28, 2024	Oct 4, 2024

Abstract

Challenges faced by the Islamic education system in Indonesia in the context of cultural, social and economic diversity. Islamic education in Indonesia has strong roots in tradition, but is faced with issues such as inequitable access to education, quality of teaching and integration of local values in the curriculum. In addition, global changes and technological developments affect the way of learning and the needs of society. This research analyzes how Islamic educational institutions can adapt to these dynamics, as well as the importance of collaboration between the government, society and educational institutions to create an inclusive and relevant system. Through a multidisciplinary approach, this article is expected to provide insights for stakeholders in formulating policies that support the diversity and quality of Islamic education in Indonesia.

Keywords : Education ; Islam ; Challenges ; Diversity ; Policy

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks diversitas budaya, sosial, dan ekonomi. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam tradisi, namun dihadapkan pada berbagai isu, seperti ketidakmerataan akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan integrasi nilai-nilai local dalam kurikulum. Selain itu, perubahan global dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara pembelajaran dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana institusi pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan dinamika tersebut, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem yang inklusif dan relevan. Melalui pendekatan multidisipliner, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberagaman dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan ; Islam ; Tantangan ; Diversitas ; Kebijakan

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah pada hakekatnya mengandung asas-asas dasar sila-sila Pancasila yang tetap, yang kemudian dikembangkan dan dipraktikkan secara dinamis, terbuka, dan selalu kekinian. Artinya, Pancasila bukan sekadar sistem gagasan yang terputus dari realitas kehidupan sehari-hari, bukan juga sekadar doktrin normatif yang hanya menekankan aspek praktis dan realistik tanpa idealisme rasional. Meskipun Pancasila selalu menyambut pengaruh budaya luar, prinsip-prinsip intinya tetap konstan. Dengan kata lain, Pancasila dapat merangkul pengaruh budaya asing selama cita-cita fundamentalnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tetap konstan. Pengembangan standar kualifikasi pendidik yang memperhatikan persyaratan pelaksanaan pekerjaan secara profesional; pengembangan kriteria pembiayaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan yang memperhatikan konsep pemerataan dan keadilan; Menerapkan manajemen pendidikanberbasis sekolah, otonomi perguruan tinggi, serta sistem terbuka dan

makna pendidikan yang berbeda. (Dede Rosyada,2010) antara sekolah yang dikelola masyarakat dan pemerintah, serta antara pelajaran umum dan agama, adalah aspek lain dari sistem pendidikan yang perlu diubah. pendidikan nasional dilakukan untuk penyegaran visi, misi, dan strategi pembangunan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan yang merupakan pranata sosial yang kuat dan berwibawa yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terpuji yang mampu menjawab tantangan dunia yang selalu berubah. (Departemen Agama RI, 2021). Otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat. , berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, reformasi justru membawa gagasan perlunya paradigma baru. Pemahaman tentang perubahan zaman, perubahan kebijakan, dan keragaman tuntutan masyarakat akhirnya menjadi penting untuk menggambarkan tren pendidikan Islam dalam konteks yang terus berubah. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga penelitian, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan jenis taklim dan satuan pendidikan sejenis nonformal telah ada sebelum adanya pendidikan resmi di pesantren, sekolah, madaraah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Islam diberikan secara informal oleh para mubaligh yang datang ke Indonesia dari berbagai negara. Titik fokus dari acara ini adalah masjid atau lokasi lain. Masyarakat umum menjadi sasaran pendidikan agama informal ini. Sementara itu, dilakukan dengan pendekatan yang unik dalam rangka mencerdaskan anak didiknya. Nama-nama tokoh cendekiawan Indonesia yang ikut mendirikan model pendidikan Islam di Indonesia muncul seiring tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam diIndonesia. Masuk akal karena pada saat itu juga ada pusat pengembangan Islam. Yang pertama di mana kekuatan politik terkonsentrasi, dan yang kedua di mana pendidikan Islam terkonsentrasi. Sistem pendidikan Islam Indonesia sebenarnya tidak disebutkan dalam sistem pendidikan nasional, dan makna manusia seutuhnya dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional melalui berbagai jenis, jenjang, karakteristik, dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses manusia yang beroperasi dalam logika berpikir sebagai makhluk yang bermoral dan berakal

budi, serta proses memanusiakan manusia. yang memiliki mandat ketuhanan, yang menyinggung hubungan seseorang dengan Tuhan dan perilaku ideal di dalamnya, dan mandat kultural. (Riant Nugroho, 2012). Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 3 konstitusi, adalah untuk "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangdemokratis serta bertanggung jawab.". (Abd. Halim Soebahar, 2019) Meskipun ada beberapa alasan mengapa pemerintah belum konsisten menjalankan UU Sisdiknas, seperti Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan, namun hal itu merupakan ikhtiar pemerintah untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Belum mengalami perbaikan mendasar, yang memberikan kesan seadanya. Mayoritas sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola dengan baik, dan upaya pembaharuan dan perbaikan pendidikan Islam sering bersifat tambal sulam atau tidak tuntas. (Riant Nugroho, 2012). Jelaslah bagaimana UU Sisdiknas tahun 2003 memperlakukan agama dan pendidikan agama. Menurut banyak makalah, pendidikan agama adalah sumber daya yang berharga dan komponen penting dari pendidikan umum. Kapasitas siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian Muslim dapat dikembangkan sebagian besar melalui pendidikan agama (terutama Islam). Sesuai dengan kekhususan agamanya masing-masing, masyarakat dapat menciptakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti madrasah diniyah Muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan lain-lain.

METODE

Studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi atau dokumen tentang berbagai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan maksud menjadi subjek penelitian atau pengumpulan data dengan kecenderungan sastra atau akademik. Informasi yang digunakan adalah informasi sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan referensi mengenai ragam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, yang kemudian dikaji dan dipelajari untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan penulis. Hasil analisis sesuai dengan judul yang penulis tulis.

HASIL

Sistem pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan akibat keberagaman dalam kurikulum, kualitas pengajar, dan perbedaan teologis. Pertama, keragaman kurikulum yang diterapkan di pesantren, madrasah, dan sekolah umum menyebabkan kesenjangan pemahaman di kalangan siswa. Misalnya, pesantren cenderung menekankan pengajaran kitab klasik, sedangkan madrasah lebih mengikuti kurikulum nasional yang mencakup pendidikan umum (Azra, 2008). Hal ini menciptakan kebingungan bagi siswa yang berusaha menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum. Kedua, kualitas sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam sering kali rendah. Banyak pengajar yang tidak memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai, sehingga berdampak pada efektivitas pengajaran (Wahid, 2015). Ketiga, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan pendidikan umum dan agama, di mana pendidikan karakter sering diabaikan dalam kurikulum sekolah umum. Hal ini mengakibatkan lulusan tidak siap menghadapi tantangan di masyarakat yang semakin kompleks (Mujiburrahman, 2010). Isu politik dan kebijakan juga memperburuk situasi, dengan pendanaan yang tidak merata dan regulasi yang membingungkan menghambat perkembangan lembaga pendidikan Islam (Baker, 2019). Akhirnya, perbedaan teologis antara kelompok Sunni dan Syi'ah sering kali menciptakan polarisasi dalam pengajaran, yang bisa mengarah pada intoleransi di kalangan siswa (Riyanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan reformasi untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berkualitas.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam di Indonesia, serta menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh dan memunculkan modifikasi teori yang relevan. Pertama, dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai keragaman kurikulum, ditemukan bahwa perbedaan pendekatan dalam pengajaran antara pesantren, madrasah, dan sekolah umum sering kali mengakibatkan kebingungan di kalangan siswa. Temuan ini mendukung teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya konteks budaya dan sosial dalam proses belajar mengajar (Fosnot, 2011). Dalam konteks pendidikan Islam, keragaman ini menunjukkan perlunya kurikulum yang lebih integratif, di mana elemen-elemen pendidikan agama dan umum dapat saling melengkapi. Kedua, terkait dengan kualitas sumber daya

manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengajar di lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki pelatihan yang memadai. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima siswa, yang sejalan dengan teori human capital yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan pengajar akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan (Becker, 2010). Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, perlu ada program pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengajar. Ketiga, perbedaan teologis yang ada antara kelompok Sunni dan Syi'ah juga memunculkan tantangan tersendiri. Temuan menunjukkan bahwa kurikulum yang tersegmentasi berdasarkan pandangan teologis tertentu berpotensi memicu intoleransi di kalangan siswa. Dalam hal ini, teori pendidikan inklusif dapat dimodifikasi untuk konteks pendidikan Islam di Indonesia, yang mengedepankan pemahaman antarbudaya dan penghargaan terhadap keragaman sebagai upaya untuk membangun toleransi (Ainscow, 2005). Dengan merumuskan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga kemampuan untuk hidup berdampingan dengan beragam keyakinan.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan terkait dengan diversitas yang ada dalam masyarakat. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam latar belakang budaya, sosial, dan pendidikan, yang berpotensi mengganggu kualitas dan konsistensi pendidikan yang diterima siswa. Akhirnya, **pemanfaatan teknologi** dalam pendidikan Islam perlu ditingkatkan. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menghambat inovasi dalam metode pembelajaran, yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Upaya untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berkualitas harus menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, Rendy. (2017). Puritanisme Dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. *Journal of Governance* 2, no. 1 https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2124.

Agustina, Aryanti. (2018). Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Menerapkan Bahan Ajar di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Jurnal Educative: *journal of educational studies*. Vol. 3 No. 1.

Baker, C. (2019). *Education Policy in Indonesia: A Study of Diversity and Reform*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

Huda, Muhammad Chairul. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1: 78–99. https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160.

M. Khalilurrohman. (2011). *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*. Jurnal Jurisdictie, Jurnal HukumDan Syariah. Vol. 2. No. 1, Juni

M. Kholid Thohiri. (2019). *Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Di Sekolah (Studi Multikasus Di SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungangung dan SMK Negeri1 Bandung Tulungagung*. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya

Mujiburrahman, M. (2010). *Islam and Politics in Indonesia: A Case Study of the Darul Islam Movement*. Jakarta: LP3ES.

Rasyid, Idris. (2019). Konsep Pendidikan Ibnu Sina Tentang Tujuan Pendidikan , Kurikulum , Metode Pembelajaran , Dan Guru Ibn Sina ' s Educational Concept of Educational Objectives , Curriculum , Learning Methods , and Teachers. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 18* 18, no. 1:779–90.

Riyadi, S., Nugroho, R., & Muhaimin, M. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *4*, 7-12.

Riyanto, S. (2021). *Intolerance and Education in Indonesia: Challenges for the Future*. Jakarta: Pusat Studi Islam dan Demokrasi.

Salsabila., U., H.,dkk. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al- Mutharahah,* 17 (2). 190

Sama, dkk. (2020). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 diKecamatan Kalianget, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*.63

Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2: 237–49. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249.

Soebahar, H. (2021). Islamic Education Transformation. *International Journal of High Education Scientists (IJHES)*, *2*(1), 1-20.

Supriyanto, Arie. (2011). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* 33, no. 2: 131–34.

Wahid, A. (2015). *Kualitas Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wardani, A., & Ayriza, A. (2021). Analisis Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Di Rumah PadaMasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi,* 5 (1).772

Widisuseno, Iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara. *Humanika* 20, no. 2: 62–66.